

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KOERSI DALAM
PENDISTRIBUSIAN SEMBAKO
(Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**YUVITA TRI REJEKI
NPM. 1621030007
Jurusan: Muamalah**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KOERSI DALAM
PENDISTRIBUSIAN SEMBAKO**

(Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

YUVITA TRI REJEKI

NPM. 1621030007

Program Studi: Muamalah



Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, MA

Pembimbing II: Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,MH

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2020 M**

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan namun Baru-baru ini terdapat suatu sistem jual beli dengan pemasaran baru yang terjadi di pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu. Dimana pada mulanya pihak distributor memberikan sembako gratis sebagai hadiah terjalannya suatu akad atau perjanjian. Dengan ketentuan apabila menerima pemberian sembako maka menyetujui untuk selalu membeli pada distributor tersebut. Jika pembeli (agen) membeli pada distributor lain maka pihak distributor yang memberikan sembako gratis akan melakukan koersi berupa tekanan ancaman dan intimidasi sehingga pihak pembeli (agen) yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dan menuruti perintah untuk selalu membeli tersebut. Jika tidak membeli maka diharuskan untuk mengembalikan seluruh sembako yang diberikannya. Masalah tersebut menurut sebagian orang dianggap biasa terutama distributor yang menggunakan sistem ini karena hal tersebut dianggap sebagai trik daya tarik dalam mencari pelanggan agar mendapatkan keuntungan yang banyak, namun sebaliknya untuk pembeli. Maka penulis menganggap masalah ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan secara terus menerus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada distributor dan agen dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah distributor dan para pembeli (agen) pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu yang berhubungan dengan praktik koersi dalam pendistribusian sembako. Setelah data terkumpul maka melakukan analisa dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode dengan cara berfikir *deduktif*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, dalam praktik pendistribusian sembako pemberian hadiah yang dilakukan oleh distributor adalah sebuah *risywah* atau sogokan kepada pembeli guna sebagai tanda persetujuan akad untuk selalu membeli. Namun apabila pembeli tersebut tidak melakukan pembelian maka pihak distributor akan melakukan tindakan koersi atau pemaksaan salah satu pihak yang mengakibatkan keterpaksaan dalam pembelian. Ditinjau dari prespektif hukum Islam praktik pemaksaan dan keterpaksaan tidak diperbolehkan karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan hal tersebut melanggar syarat dalam jual beli serta pemanfaatan harta secara batil.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Yuyita Tri Rejeki

Npm : 1621030007

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

**Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Koersi Dalam Pendistribusian Sembako
(Studi Pada Pasar Adiluwih Kec.
Adiluwih Kab. Pringsewu)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, MA

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., MH

NIP. 196603301992031002

NIP. 197112041997032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako"** (Studi pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu).
Disusun oleh : **Yuyita Tri Rejeki, NPM. 1621030007**,
program studi : **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang
Munaqosah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua penguji : **Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

Sekretaris : **Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

Penguji I : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

Penguji III : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

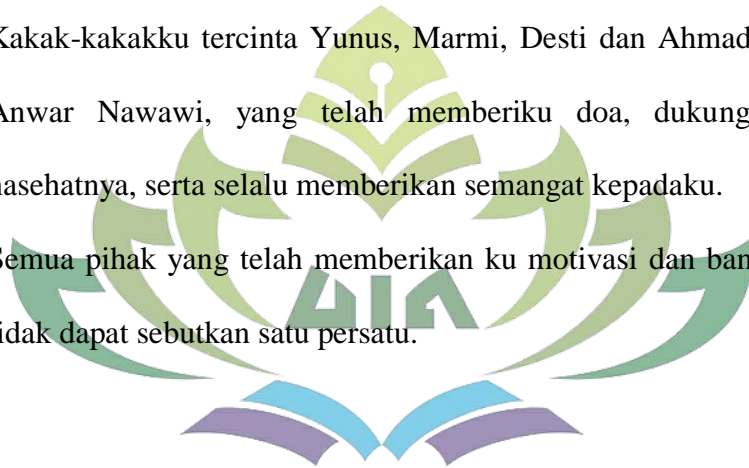
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’ (4):29)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang:

1. Ayahanda tercinta (Turman) Ibunda tercinta (Sumiati) yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, mendukung, mensupport serta memberikan motivasi dan kasih sayangnya. Tak luput juga dengan pengorbanan yang tak ternilai dan tak terbalas.
2. Kakak-kakakku tercinta Yunus, Marmi, Desti dan Ahmad Fauzi, dan M. Anwar Nawawi, yang telah memberiku doa, dukungan, saran dan nasehatnya, serta selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Semua pihak yang telah memberikan ku motivasi dan bantuan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.



RIWAYAT HIDUP

Yuvita Tri Rejeki, lahir di Totokarto pada tanggal 05 Oktober 1997, Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Anak ke-3. Merupakan buah cinta dari pasangan bapak Turman dan ibu Sumiati. Pendidikan dimulai dari SDN 02 Waringin Sari Timur (Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu) lulus tahun 2010, SMP N 02 Adiluwih (Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu) lulus tahun 2013, SMA N 01 Sukoharjo, (Kecamatan Waringinsari, Kabupaten Pringsewu), lulus tahun 2016, Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1).



KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KOERSI DALAM PENDISTRIBUSIAN SEMBAKO (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) Di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, MA selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,MH Selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Muhammad Anwar Nawawi, Via Reza Putri, Diana Nopita Sari, Nurjanah Shinta, Syifa Putri Nazela, Santi Purnama Sari, Yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
8. Teman-teman Muamalah A dan kelompok KKN 77 angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
9. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Penulis, Bandar Lampung 2019

Yuvita Tri Rejeki
NIP. 1621030007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli	25
5. Akad dalam Jual Beli	29
6. Manfaat Jual Beli	39
B. Risywah dalam Islam	40
1. Pengertian <i>Risywah</i>	40
2. Dasar Hukum Risywah	41
3. Unsur-Unsur Risywah	42
4. Macam-Macam Risywah	43
C. Distribusi dalam Islam	46
1. Pengertian Distribusi	46
2. Dasar hukum distribusi	47
3. Prinsip-Prinsip Distribusi	47
4. Tujuan Distribusi	48

D. Tinjauan Pustaka.....	48
--------------------------	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Adiluwih dan Kecamatan Adiluwih	51
B. Praktik Koersi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.....	70
1. Subjek dan Objek	70
2. Tempat dan Tujuan.....	71
3. Prosedur atau mekanisme	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Koersi dalam Pendistribusian Sembako di Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu	85
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi dalam Pendistribusian Sembako di Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu), adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

“**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.”¹

“**Praktik** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori”.²

“**Koersi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan yang dilakukan dengan ancaman, imbalan, atau intimidasi.”³

¹Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1098.

³*Ibid*, h. 579.

Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.⁴ Koersi yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan yang digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara memaksa pihak lain untuk berperilaku spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan yang membuat pihak lain menjadi melemah.

“**Distribusi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.”⁵ Distribusi juga diartikan sebagai proses pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang.

“**Sembako** adalah singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Anggota bahan-bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan Menteri Industri Dan Perdagangan NO.115/NPP/KEP/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, yaitu antara lain: beras dan sagu, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, daging (sapi dan ayam), gula pasir, susu, garam yang mengandung yodium/iodium, minyak goreng, Margarin, minyak tanah/gas elpigi.”⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul ini adalah jual beli dalam pendistribusian sembako yang dilakukan menggunakan praktik koersi dengan pemberian hadiah sebagai *risywah* atau

⁴Paksaan atau Koersi (On-Line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> (20 April 2019)

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 270.

⁶Arti Pengertian, Penjelasan dan Daftar Sembako, (On-line), tersedia di: <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-sembako-semilan-bahan-pokok.html#.XbUbM> UzbiU (20 April 2019)

sogokan yang diberikan oleh distributor kepada agen yang berperan pembeli di pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)”** yaitu sebagai berikut:

1. Alasan objektif, dengan melihat munculnya masalah pendistribusian sembako namun terkadang dalam pendistribusian tersebut dilakukan dengan tindakan koersi terhadap salah satu pihak demi terciptanya pangsa pasar yang diinginkan. Koersi tersebut dilakukan dengan cara memberikan sejumlah imbalan atau hadiah bersyarat sebagai salah satu cara untuk mencari pelanggan dan meningkatkan jumlah pembelian. Dalam pendistribusian tersebut menimbulkan spekulasi bahwa hanya menguntungkan salah satu pihak sehingga penelitian ini dianggap perlu dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.
2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta banyaknya teori dan literatur yang mempermudah dalam proses penyelesaiannya.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah, tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Perkembangan masyarakat di era modern seperti sekarang ini semakin banyak dan berkembang, sehingga kebutuhan pun semakin meningkat baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan primer menjadi hal utama dalam kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia diantaranya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus memenuhi segala macam kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan.⁷ Sembako atau sembilan jenis bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan gula merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak, artinya kebutuhan ini harus terpenuhi terlebih dahulu dari pada kebutuhan lainnya.

Manusia bukanlah makhluk individu yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh sebab itu adanya sebuah transaksi jual beli

⁷Endri Widodo, "Kebutuhan Dasar Manusia" (On-line), tersedia di: <https://endriku.wordpress.com/2017/09/07/Kebutuhan-Dasar-Manusia/>, (17 Maret 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ “Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (Hukum Islam).”⁹ Seiring berkembangnya zaman produk yang di jual belikan kini dapat di distribusikan dengan berbagai cara. Pendistribusian dapat diartikan sebagai proses, cara, atau kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).¹⁰

Namun karena sulitnya persaingan dalam mencari pelanggan membuat para pelaku pasar yaitu distributor selaku penjual dan agen selaku pembeli saling bekerja sama yang akan menimbulkan sebuah perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹¹ Dalam QS. Al.-Maidah (5) ayat 1

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Uii Press, 2000) h. 11

⁹ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pematnet, 2016), h. 104.

¹⁰ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Karya Abditama, 2001) h. 125.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah Studi Teori Akad Dalam Fikih Mu’amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5): 1)

Dalam ayat tersebut menjelaskan keharusan memenuhi janji atau ‘akad. kata akad yang berarti janji atau perjanjian, maksudnya adalah perjanjian antara Allah dengan hambanya, hamba dengan dirinya sendiri dan hamba dengan orang lain. Demi terciptanya rasa aman, dan bahagia terhadap manusia dan keharusan untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa.

Dalam perjajian yang telah dibuat terdapat praktik koersi yang di lakukan oleh distributor pada saat mendistribusikan sembako atau sembilan bahan pokok seperti yang terjadi pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu. Koersi adalah sebuah praktik yang memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan dan kekuatan. Pendistribusian yang dilakukan di pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu tersebut dilakukan dengan cara memberikan sembako berupa beras, telur dan gula gratis sebagai hadiah atau imbalan pada awal pembelian, namun dengan syarat mereka harus selalu membeli pada distributor tersebut.

Hadiah atau imbalan tersebut di jadikan sebagai suap, sogokan atau iming-iming terhadap pembeli yang dalam Islam disebut dengan *risywah*.

Risywah ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya). Seiring berjalannya waktu agen yang menerima hadiah imbalan atau *risywah* sembako tersebut merasa keberatan jika harus selalu membeli pada distributor tersebut. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak ada pembeda antara membeli grosir maupun ecer dan apabila pihak distributor mengetahui bahwa pihak agen membeli pada distributor lain serta melanggar akad/perjanjian maka pihak distributor melakukan sebuah ancaman untuk mengembalikan semua barang hadiah atau imbalan yang sudah diberikan kepada distributor dan mengintimidasi agen dengan menggunakan kalimat bernada tinggi yang membuat pihak agen merasa dipermalukan dihadapan publik.

Trik atau cara koersi dengan pemberian hadiah atau imbalan bersyarat tersebut dilakukan oleh beberapa oknum sebagai suatu cara untuk meningkatkan jumlah pembelian dan mendapatkan banyak pelanggan. Padahal di jelaskan dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S An-Nisa' (4): 29)

Ayat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dilarang memakan harta seseorang dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka, dan ayat tersebut juga menjelaskan agar

salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Karena berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), keduanya tidak mubazir dan baligh merupakan salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli.

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa praktik koersi dalam pendistribusian sembako pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu layak untuk di bahas, dengan melihat adanya perintah dalam Islam bahwa setiap orang harus memenuhi suatu akad atau janji namun jual beli juga tidak sah jika dengan keterpaksaan salah satu pihak. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam hal ini, yang penulis teliti terkait dengan praktik koersi terhadap pendistribusian sembako, yaitu ketika melakukan proses jual beli dengan menggunakan praktik koersi yang disertai hadiah imbalan atau *risywah* yang mengakibatkan keterpaksaan salah satu pihak.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa transaksi jual beli yang terjadi pada pendistribusian sembako sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi dilakukan dengan beberapa ketentuan yang harus dilakukan dan menggunakan praktik koersi atau praktik melemahkan pihak lawan. Fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi dalam Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah distributor di Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu

2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik pendistribusian sembako dengan cara koersi di Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Koersi dalam Pendistribusian Sembako pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi dalam Pendistribusian Sembako tersebut?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik koersi dalam pendistribusian sembako pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik koersi dalam pendistribusian sembako pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah tindakan koersi dalam pendistribusian sembako, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹² Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹³

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”¹⁴

Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako yang sudah berjalan baru-baru ini di dalam masyarakat dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada praktik koersi pada pendistribusian sembako.

¹²Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 41.

¹³Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁴Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu “... penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden...”¹⁵ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai praktik koersi dalam pendistribusian sembako pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian “...baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu...”¹⁶

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan suatu objek bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik koersi dalam pendistribusian sembako ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁵*Ibid*, h. 9.

¹⁶*Ibid*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer (*Primary Data*) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari distributor selaku penjual dan agen sebagai pembeli.
- b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.”¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

“Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.”¹⁹ Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 13 orang pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, yaitu Bapak Een (distributor), Ibu Suratning, Bapak

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 188.

Anton, Ibu Sumi, Ibu Ida, Ibu Neneng, Ibu Yanti, Pak Edo, Pak Anto,
Ibu Lasminah, Ibu Siti, Ibu Tursinah, Ibu Puji Hartati

b. Sampel

“Sampel menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.”²⁰ Jadi dikarenakan populasi yang diambil dalam penelitian ini kurang dari 100 maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi yaitu sebanyak 13 orang, dari 1 distributor dan 12 agen atau pembeli.

4. Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. *Interview*

“*Interview* (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).”²¹ *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode interview yang di gunkaan yaitu metode *interview* bebas terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan praktik koersi dalam pendistribusian sembako.

²⁰*Ibid*, h. 109.

²¹Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

b. Observasi

“Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik.”²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan merekam, memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat remi.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.²³

²²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

²³Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 122.

- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.”²⁴

6. Analisa Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁵ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu praktik koersi dalam pendistribusian sembako ditinjau dari Hukum Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analitis.

“Metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.”²⁶

Maksudnya bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui praktik pendistribusian sembako dengan cara koersi dilihat dari Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

Dalam menganalisa penulis menggunakan pendekatan berfikir *deduktif* dan *induktif*. Berfikir *deduktif* yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode *deduktif* diawali dengan sebuah teori dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 205.

²⁶ Rama Dona Laila, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang”. (Skripsi Program Strata I Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2018), h. 10.

kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. Sedangkan berfikir *induktif* adalah metode yang digunakan dengan bertolak dari khusus ke umum.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata **البيع** yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الثراء** dengan demikian kata **البيع** berarti jual dan sekaligus berarti “beli”.²⁷ Jual beli menurut pengertian *Lughowiyah*:

²⁸ مُعَا بَلَهُ الشَّيْءُ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

“Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.”²⁹

Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

³⁰ مُبَا دَلَهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Penukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).”

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

³¹ مُعَا بَلَهُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

²⁷ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam* (Palu: IAIN Palu, Desember 2014, Vol. 11 No 2 Desember 2014) h. 373.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Ke 5 (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 73.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

³⁰ Al-Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyah Wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy 1357). h.8.

“Pertukaran harta dengan harta (orang lain) untuk kepemilikan.”

“Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”³²

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa

“Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).”³³

“Jual beli dalam prespektif hadis Nabi yaitu jual beli mendapatkan aspirasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai mahluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain.”³⁴

Sebagaimana yang ada dalam prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip kebermanfaatan
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak melarang

Jual beli dapat terjadi dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertukaran harta dengan antara dua atas dasar saling rela.

³¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, Tt h.12.

³² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2009). h. 366.

³³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*..., h. 104.

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 158.

³⁵ Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Dasar hukumnya yaitu:

- a. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

“Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang yang melakukan praktik riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak nyaman, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa' (4):29)

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 588.

b. As-Sunnah

Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab. “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibnu Rafi’).” Maksud dari hadis ini adalah jual beli terhindar dari usaha tipu-tipu dan merugikan yang lain. Dan Hadist Nabi, Rasullullah menyatakan: “jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi).”³⁷

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁸

Para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa

“Jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (Ahli Fikih Mazhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.”³⁹

³⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul....*, h. 75.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 117.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkaan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (dilakukan) dan tidaknya (ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴⁰ Adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'akud alaih* (objek akad).⁴¹

Adapun rukun jual beli sebagai berikut:⁴²

- 1) *Al-'aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) *Mauqud alaih*, yaitu suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.

“Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya pada ijab dan kabulnya saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak terlihat maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)”⁴³

⁴⁰ M. Abdul Mujib, Mbruru Thalahah dan Syafi'a, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 301.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 70.

⁴² Abdurahman Al-Jarizi, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 11.

⁴³ *Ibid*, h. 118.

b. Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat- syarat jual beli adalah:

1) Subjek jual beli, yaitu para penjual dan pembeli disyaratkan:

a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.⁴⁴ Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

“Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, malikiyah dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah mumayyiz adalah sah selama ada izin walinya. Mumayyiz dalam arti dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk.”⁴⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodoh...” (QS. An-Nisa’ (4): 5)

b) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih) dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan, namun jika belum mencapai 15 tahun boleh melakukan

⁴⁴ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, h. 105.

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65.

jual beli namun dengan taraf yang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁶

- c) Atas kemauan sendiri, Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.⁴⁷

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena putusan hakim untuk melunasi hutang.⁴⁸

- d) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.⁴⁹

2) Objek (benda dan uang) disyaratkan:

- a. Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*.

Mal mutaqawwim merupakan benda yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya, Serta suci dan bersih barangnya. Bukan tergolong benda najis dan haram.

⁴⁶ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)...., h. 105.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 66.

⁴⁹ Ibid.

b. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan).⁵⁰

c. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang masih belum jelas buahnya (masih dalam putik).

d. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

3) Shighat ijab dan kabul disyaratkan:⁵¹

a. Ijab dan kabul diucapkan oleh yang mampu (*ahliyah*)

b. Harus ada kesesuaian antara ijab dengan kabul.

c. Ijab dan kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain.

d. Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.

⁵⁰ *Ibid*, h. 67.

⁵¹ *Ibid*, h. 69.

- e. Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah,

“Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.”⁵²

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli).⁵³

1) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah begitu pula jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa dijelaskan sifatnya dianggap tidak sah, karena ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet 3, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 190.

⁵³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, h. 111

4) Jual beli *fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama “jual beli yang demikian tidak sah, sebab dianggap mengambil hak atau milik orang lain (mencuri).”

5) Jual beli yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Jual beli yang dilakukan oleh orang – orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipercaya.

6) Jual beli *malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. “Jual beli ini menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.”⁵⁴

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:⁵⁵

1) Jual beli *gharar*

Jual beli yang mengandung ketidakjelasan, jual beli yang seperti ini tidak sah.

“Kata *gharar* berarti khalayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko, dalam keuangannya biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko.”⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, h. 112

⁵⁵ *Ibid*, h.113

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung yang ada diudara dan ikan yang ada didalam air dipandang tidak sah, karena jual beli tersebut tidak adanya kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah.

4) Jual beli sperma binatang

Jual beli ini seperti mengawinkan sapi jantan dengan betina untuk mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli barang yang dihukumkan najis dalam Al-Quran seperti arak dan babi.

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut

Jual beli ini adalah haram karena belum jelas ada dan belum tampak.

7) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli basah dengan yang kering. Contohnya jual beli jagung yang kering dengan jagung yang basah, dengan ukuran yang sama sehingga akan merugikan salah satu pihak.

⁵⁶Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al 'Adalah, Vol. XII, No. 03 juni 2015, h. 656 (on-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (4 Juli 2019), Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Ilmiah.

8) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli tanaman yang masih berada diladang, sawah, atau kebun.

9) Jual beli *Mullamasah*

Jual beli dengan cara sentuhan.

10) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli dengan cara lempar-lemparan misalnya: seseorang berkata lemparlah padaku apa yang ada padamu, nanti akan kulemparkan juga apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-melempar tersebut maka terjadilah jual beli.

5. Akad dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.⁵⁷ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, (العقد) memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*Al-Ittifaq*).⁵⁸

Menurut bahasa '*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.⁵⁹

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

⁵⁸ Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

- 2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.⁶⁰
- 3) Janji, dalam perdata Islam disebut dengan *Wa'd*. Yaitu keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Adapun *muwa'adah* adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.⁶¹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُثْمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah bin Amr bin Ash ra. Berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “ada empat hal, jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi munafik sejati. Tetapi jika salah satunya terdapat pada diri seseorang, maka ia mempunyai salah satu sifat orang munafik sampai meninggalnya. (empat hal itu), bila dipercaya ia berkhianat, bila berselisih ia menyimpang dari kebenaran.” (Muttafaq ‘alaih)⁶²

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *muwa'adah* itu diperbolehkan jika status janjinya tidak mengikat. Ketentuan tidak mengikat karena jika *muwa'adah* mengikat, maka substansinya sama dengan akad, maka *muwa'adah* untuk menjual maupun membeli tidak boleh karena janji untuk membeli bukan termasuk

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih muamalah Dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 3.

⁶² Imam Nawawi, *Syarah Dan Terjemahan Riyadhus Shalihin Jilid 1* (Jakarta: Al-I'tishom, 2005) Hadist No. 2/690 h. 759

akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum. Dalam hal ini keinginan untuk melakukan akad dapat dikatakan sah apabila dilakukan pada saat itu bukan pada waktu mendatang.⁶³

“Menurut jumhur fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah kaidah umum mu’amalat dalam Islam, karena memenuhi janji itu hukumnya wajib.”

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah (5) : 1)

Ayat di atas bersifat umum tanpa merinci jenis-jenis akadnya, dengan kaidah yang berlaku dalam muamalah adalah *Al Ashlu Fil Mu’amalat Al-Ibahah* (hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh).⁶⁴

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*....,h. 31

⁶⁴ *Ibid*, h. 14

Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.”⁶⁵
2. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”⁶⁶
3. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”⁶⁷
4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁶⁸

Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.⁶⁹

⁶⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h.144.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21.

⁶⁹ *Ibid.*

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a) *Aqid*, yaitu orang yang berakad.
- b) *Mau'quh 'Alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan.
- c) *Maudu' Al'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) *Sighat Al'aqd*, yaitu ijab dan qabul.

“Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.”⁷¹

“Rukun akad menurut kalangan Hanafiyah adalah *sighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Sedangkan Rukun aqad menurut Jumhur Fuqaha' selain Hanafiyah terbagi menjadi tiga yaitu *aqidain* (dua orang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad) dan *sighat aqad* (ijab dan kabul).”⁷²

2) Syarat akad

Syarat adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu. Adapun syarat-syarat akad adalah:⁷³

- a) Orang yang berakad (*Akid*) disyaratkan harus mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 46.

⁷³ *Ibid* h. 47.

- b) Objek akad (*Ma'uqud 'alaih*) disyaratkan bahwa: "... dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki)..." Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti akad terhadap sesuatu yang tidak ada, Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi maupun immateri.
- c) Shigat akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. Shigat terdiri dari ijab dan qabul.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

1) Ketidakjelasan (*Jahalah*)

Yang di maksud disini adalah ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit di selesaikan.

Ketidakjelasan ada empat macam, yaitu:⁷⁴

- a. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
- b. Ketidakjelasan harga
- c. Ketidakjelasan masa (tempo) seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini harus jelas jika tidak jelas maka akad menjadi batal

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 190.

d. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya⁷⁵

Paksaan ada dua macam:

- a. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat.
- b. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah dan *mauquf* menurut Zufar.⁷⁶

3) Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*)

Jual beli dengan pembatasan waktu hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktu.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Gharar yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang.

5) Kemudharatan (*Adh- Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, h.191

kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

6) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.⁷⁷

Menurut Prof. Dr. Fathurahman Djamil,

“Dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, bahwa baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat akad.”⁷⁸

c. Macam - Macam Akad

1) Akad berdasarkan motifnya:⁷⁹

- a) Akad *tabarru'* Adalah “jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non-profit (transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan).”
- b) Akad *mu'awadah* atau akad *tijarah* Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi

⁷⁷ *Ibid*, h. 192.

⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 75.

⁷⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 36.

bisnis dengan motif untuk mendapatkan laba (*profit oriented*)

Contohnya : jual beli, ijarah, murabahah.

2) Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁸⁰

a. Akad yang Sah

Kriteria akad yang sah yaitu:

- Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- Akad yang sah adalah “akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan atau penyamaran.”

b. Akad yang Fasad, adalah “akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

c. Akad yang Batal, adalah “akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnya.”

3) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi :⁸¹

Akad yang pokok (*Al-‘Aqd Al-Ashli*) dan akad asesor (*Al-‘Aqd At Tab’i*).

a) *Akad pokok* adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain.

⁸⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h. 155.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 81

Termasuk ke dalam jenis ini adalah akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

- b) *Akad asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah tidaknya akad tersebut di dalam

- 4) Akad dari segi unsur tempo akad dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) “Akad bertempo (*al- ‘aqd az-zamani*) adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur-unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Contohnya: akad ijarah, wadiah, wakalah.”⁸²

- b) “Akad tidak bertempo (*al- ‘aqd al-fauri*) adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya: akad jual beli”⁸³

- 5) Dilihat dari segi terjadinya/keberlakuannya dibagi menjadi tiga, yaitu:⁸⁴

- a) Akad konsensual (*al- ‘aqd al-radha’i*)

Perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya karena adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak.

- b) Akad formalistik (*al- ‘aqd al syakli*)

⁸²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 159.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 160.

Akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah.

c) Akad riil (*al- 'aqd al- 'aini*)

Akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek. Apabila tidak dilakukan penyerahan, akad dianggap belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum.

d. Berakhirnya akad

Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan).

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.⁸⁵

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
- 2) Dengan sebab adanya khiyar
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktu
- 6) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.

⁸⁵*Ibid* h. 100.

7) Karena kematian.

6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Hikmah dan manfaat yang diperoleh ketika melakukan transaksi dalam jual beli diantaranya:⁸⁶

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang didapatkan dengan cara yang batil
- c. Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dengan cara yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak.
- e. Dapat membeina ketenangkantentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh riski yang cukup dan menerima dengan ikhlas terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Risywah dalam Islam

1. Pengertian Risywah

Suap-menyuap dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. Sedang dalam bahasa Arab disebut dengan *rasywah*” atau “*rasya*”, secara bahasa bermakna “memasang tali, ngemong, mengambil hati.”⁸⁷ Sedangkan dalam istilah, *risywah* diartikan dengan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk

⁸⁶ *Ibid*, h.121.

⁸⁷ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyyati*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 9

mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.⁸⁸ Dalam kitab *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah* yang dimaksud *risywah* (suap/sogok) adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang batil. Dalam kitab *Al-Misbah Al-Munir* karya *Al-Fayyumi rahimahullah* mengatakan bahwa *risywah* (suap/sogok) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. Sedangkan dalam kitab *An-Nihayah Fi Gharibil Hadits*, Ibnu Al-Atsir *rahimahullah* mengatakan bahwa *risywah* (suap/sogok) ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya).

2. Dasar Hukum *Risywah*

Dalam Islam, tentunya hukum *risywah* tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Akan tetapi secara umum, hukum *risywah* menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi *risywah*, penerima *risywah* juga akan dilaknat oleh Rasulullah SAW, berikut dalil-dalil yang menyatakan bahwa *risywah* adalah haram:

- a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

⁸⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Keuangan*, (Jakarta: Jajawali Pers, 2009), h. 45.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Dasar hukum lainnya juga terdapat pada QS. Al-Maidah (5) : 42

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلْسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun.”

b. Al-Hadits

Imam At-Thirmidzi meriwayatkan dalam sunannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّأْيِيَّ وَالْمُرْتَثِيَ فِي الْحُكْمِ

“Dari Abu Hurairoh Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”⁸⁹ (HR. Thirmidzi)

3. Unsur-Unsur Risywah

Unsur atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah tindakan. Dikarenakan unsur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dan memberikan suatu kepastian hukum tertentu. Secara garis besar, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad *hibah*, karena suap adalah *hibah* yang didasarkan

⁸⁹ Muhammad Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Dar Al Grob Al Islami, Beirut, 1998, Juz 3 h. 15. Hadist Hasan No. 1336

atas tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syari', seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta *risywah* diidentikkan dengan memakan harta yang diharamkan Allah.⁹⁰ Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah:

- a. Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.⁹¹
- b. Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.⁹² Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
- c. Suapan atau harta yang diberikan.⁹³ Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

⁹⁰ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati...*, h. 10

⁹¹ *Ibid*, h. 11

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Ibid*.

4. **Macam- Macam *Risywah***

Secara umum, jenis *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *riywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga, yaitu:

- a. *Risywah* untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil

Risywah (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena haq itu kekal dan batil itu sirna.⁹⁴

Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang haq (benar) adalah suatu kebenaran yang hakiki, sedangkan sesuatu yang batil adalah suatu yang dosa. Praktik suap ini haram hukumnya, karena mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah.⁹⁵

- b. *Risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman

Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud diatas, dosanya adalah untuk yang menerima suap.⁹⁶ Para Ulama' telah bersepakat mengenai hukum *risywah* yang sedemikian ini, karena dilakukan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi *risywah*. Hal ini didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud, ketika ia ada di

⁹⁴ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati...*, hal. 11

⁹⁵ Muhammad Nurul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (TK: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 119

⁹⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 230

Habasyah, tiba-tiba ia dihadap oleh orang yang tidak dikenal, maka ia memberinya uang dua dinar, yang kemudian, ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan.⁹⁷

c. Risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah. Salah satunya dengan memberi suap kepada pihak terkait atau kepada pejabat tertentu dengan tujuan untuk dinaikkan jabatannya atau untuk mendapatkan pekerjaan.

Meskipun *risywah* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, akan tetapi ada banyak cara yang dilakukan oleh seseorang guna menyamarkan *risywah* tersebut seperti pemberian hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu bantuan dari orang yang diberi.⁹⁸ Dari pengertian tersebut jelas bahwa hadiah adalah perbuatan yang terbebas dari unsur-unsur *risywah*, akan tetapi pada saat-saat tertentu hadiah dapat dikategorikan sebagai *risywah* jika yang menerima adalah pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Karena dikhawatirkan digunakan untuk memanfaatkan jabatannya atau kekuasaannya, karena hadiah yang diberikan kepada pejabat atau penguasa lebih sering diberikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan penerima hadiah dikarenakan kedudukannya.

⁹⁷ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati...*, hal. 18

⁹⁸ Ibid., hal. 25

C. Distribusi dalam Islam

1. Pengertian Distribusi

Distribusi (*dulah*) secara bahasa berarti “perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum.” Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (didistribusikan). Adapun menurut istilah mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.⁹⁹

“Distribusi adalah suatu proses penyaluran dan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai yang mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi tidak lancar.”¹⁰⁰

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. “Menurut Muahammad Anas Zarqa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain.”¹⁰¹

Distribusi dapat pula diartikan cara menentukan metode dan jalur yang akan dicapai dalam menyalurkan produk ke pasar. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat

⁹⁹ Isnaini Harahap, Yenni Samri JN, Marliyah Rahmi, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 125.

¹⁰⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2015) h. 128.

¹⁰¹ *Ibid*, h.126.

waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karena itu harus memiliki strategi untuk mencapai target pasardan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda.¹⁰²

2. Dasar Hukum Distribusi

Dalam Firman Allah Swt Q.S Al-Isra' (17) Ayat 29-30

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
 ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
 بَصِيرًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya[852] karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”

3. Prinsip-Prinsip Distribusi

Islam adalah agama yang sangat mendukung pertukaran barang dan mendukung para pedagang untuk mencari sebagian karunia Allah SWT. Yang bisa dilakukan dengan cara berdagang namun tetap mengedepankan jujur dan adil serta mengedepankan prinsip-prinsip dalam distribusi, diantaranya:¹⁰³

¹⁰²Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 195.

¹⁰³Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 363

- a. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- b. Antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan kabul dalam akad-akad.
- c. Tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut
- d. Jauh dari perselisihan.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi yaitu:¹⁰⁴

a. Prinsip kebebasan

“Kebebasan disini adalah kebebasan bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan.¹⁰⁵ Dalam konsep Islam permintaan dan penawaran dalam distribusi haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.”

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Karena ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan sistem ekonomi Islam dan tidak dibenarkan oleh syara”

Menurut Muahammad Anas Zarqa beberapa “prinsip distribusi menurut ekonomi Islam, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk.
- b. Menimbulkan efek positif bagi pemberi.
- c. Menciptakan kebaikan di antara semua orang, antara kaya dan miskin.
- d. Mengurangi kesenjangan pendapat dan kekayaan.
- e. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam.
- f. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.”¹⁰⁶

¹⁰⁴Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997) h. 302

¹⁰⁵Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, h. 364

¹⁰⁶ Isnaini Harahap, Yenni Samri JN, Marliyah Rahmi, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 126

4. Tujuan Distribusi

“Tujuan distribusi dalam Islam antara lain, *pertama* menyatukan hati manusia dalam kebaikan dan kebenaran dari nilai-nilai ahliyah sehingga mereka semakin taat kepada pencipta- Nya; *kedua*, membersihkan dan mensucikan manusia dari sifat serakah, tamak, egois dan individualis; *ketiga*, membangun kesetiaan sosial dan kebersamaan, menjalin ikatan cinta kasih sayang dan mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat; *keempat*, tujuan ekonomi yaitu pengembangan harta, memberdayakan sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi serta pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efektif dan berdaya guna; *kelima*, menghindari kegiatan *spekulatif* dan kezaliman dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.”¹⁰⁷

Adapun yang menjadi tujuan pokok distribusi yaitu:¹⁰⁸

- a. Meyalurkan produk dari produsen ke konsumen
- b. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi
- c. Menjaga stabilitas perusahaan
- d. Sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah
- e. Peningkatan nilai barang dan jasa
- f. Supaya proses produksi merata
- g. Mempertahankan kontinuitas proses produksi
- h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 147

¹⁰⁸ Pengertian Distribusi, Saluran, Fungsi Kegiatan dan Contohnya, (On-line) tersedia di: <https://jurnalmanajemen.com/Distribusi/> (11 September 2019)

1. Penelitian Faisal Agnia (2017) yang berjudul “*Jual Beli Makanan Dan Minuman Secara Paksa Di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang*” Studi Presfektif Sosiologi Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Berlangsungnya praktik jual beli ini dilandasi oleh tiga faktor. *Pertama*, pemerintah yang tidak tegas dalam menindak praktik yang sudah beredar dan mengakar dimasyarakat ini. Tidak adanya peraturan daerah (PERDA) mengakibatkan keberlangsungannya terus menerus terjadi. *Kedua*, penjual yang lain adalah warga sepanjang jalan legok-coenggeang kurang memahami bagaimana tata cara jual beli yang baik. *Ketiga*, pembeli yang dalam hal ini adalah para supir truk merasa sangat terpaksa. Namun mereka membutuhkan jalan tersebut untuk akses menuju tempat penambangan pasir.¹⁰⁹
2. Penelitian Muchamat Yudianto (2015) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kec. Sluke Kab. Rembang Jawa Tengah*”. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Muhamadiyah Surakarta. Dengan hasil penelitian praktik jual beli ikan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah memenuhi rukun jual beli namun, dalam hal pelaksanaan pembayaran dan penyerahan dilakukan oleh tengkulak dan nelayan secara kontan di tempat penimbangan ikan serta disaksikan oleh *pendego* dan karyawan tengkulak. Transaksi tersebut

¹⁰⁹Faisal Agnia, *Jual Beli Makanan dan Minuman Secara Paksa Di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang*, (Studi Presfektif Sosiologi studi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

terlihat sah karena berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, proses tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan rukun jual beli.¹¹⁰

3. Penelitian Sabila Rahma Kholifiana (2018) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto Di Kawasan Makan Gus Dus Tebuireng Jombang*. Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel. Dengan hasil penelitian Bahwa praktik jual beli foto di kawasan makam Gus Dus Tebuireng Jombang dilakukan para fotografer untuk mengabadikan moment tanpa sepengetahuan peziarah, setelah itu foto diperjualbelikan dengan cara meminta penziarah untuk membelinya. Apabila dilihat menurut hukum Islam dari rukun dan syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu adanya unsur paksaan, maka hal itu dapat mempengaruhi kerelaan pihak pembeli. Sehingga hak *khiyar* menjadi hilang.¹¹¹

¹¹⁰ Muchamat Yudianto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kec. Sluke Kab. Rembang Jawa Tengah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015)

¹¹¹ Sabila Rahma Kholifiana, *Tinjauan Hukum Islm Terhadap Praktik Jual Beli Foto Di Kawasan Makan Gus Dus Tebuireng Jombang*, (Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Bin Muhsin Abdul, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Islamiyyati*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Al-Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyah Wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa Al-Babiy 1357.
- Ali, Daud *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Al-Jarizi, Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum dan Abu Hurairah*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001
- Amalia, Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1*, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Teori Akad dalam Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, TK: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Ash-Shieddieqy, T.M Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- At Tirmidzi, Muhammad Isa, *Sunan At Tirmidzi, Dar Al Grob Al Islami*, Beirut, 1998, Juz 3 h. 15. Hadist Hasan No. 1336
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii Press, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Harahap, Isnaini Yenni Samri JN, Marliyah Rahmi, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta : Kencana, 2005.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis* Bandar Lampung: Pematnet, 2016

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Keuangan*, Jakarta: Jajawali Pers, 2009

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pres, 2017.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Muhammad, Abi Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, Th. 12.

Muhammad, Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Mujib, M. Abdul, Mbruru Thalahah dan Syafi'a, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Muslich, AhmadWardi *Fiqh Muamalat*, Cet 3 , Jakarta: Amzah, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Qardawi, Yusuf *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 .
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Vol. 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan, 2015
- Syah, Islam Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syaifulah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Palu: IAIN Palu, Desember 2014, Vol. 11 No 2 Desember 2014.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Jurnal

- Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. XII, No. 03 juni 2015, h. 656 (on-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (4 Juli 2019), Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Ilmiah.
- Endri Widodo, "Kebutuhan Dasar Manusia" (On-line), tersedia di: <https://endriphu.wordpress.com/2017/09/07/Kebutuhan-Dasar-Manusia/>, (17 Maret 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015.

Wawancara

Bapak Anto, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 3 September 2019

Bapak Anton, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 3 September 2019

Bapak Een, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 3 September 2019

Bapak Edo, wawancara dengan penulis, i Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 6 September 2019

Ibu Ida, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 6 September 2019

Ibu Lasminah, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 10 September 2019

Ibu Neneng, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 6 September 2019

Ibu Puji Hartati, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 25 Oktober 2019

Ibu Siti, wawancara dengan penulis, pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 10 September 2019

Ibu Sumi, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 6 September 2019

Ibu Suratning, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 3 September 2019

Ibu Tursinah, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 25 Oktober 2019

Ibu Yanti, wawancara dengan penulis, Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, 6 September 2019

Sumber On-Line

[http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-](http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-sembako-sembilan-bahan-1-pokok.html#.XbUbMUzbiU)

[sembako-sembilan-bahan-¹ pokok.html#.XbUbMUzbiU](http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-sembako-sembilan-bahan-1-pokok.html#.XbUbMUzbiU) (20 April 2019)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> (20 April 2019)

<https://jurnalmanajemen.com/Distribusi/> Diakses tanggal 11 September 2019

Rama Dona Laila, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang”, Skripsi Program Strata I Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2018.

